**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Akuntansi**

**2.1.1.1 Pengertian Akuntansi**

Definisi akuntansi seperti yang diberikan oleh Komite Terminologi dari *American Institute of Certified Public Accountants* dalam Riahi (2011:50) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Walter T. Harisson dan Charles T. Horngren yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2011:4) mengemukakan definisi akuntansi adalah sebagai berikut :

“akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”.

Menurut Rudianto (2012:15) mengemukakan pengertian akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Ruang lingkup akuntansi sebagaimana yang dijelaskan oleh definisi di atas tampak seperti terbatas, sebuah perspektif yang lebih luas dinyatakan dalam definisi yang menggambarkan akuntansi menurut Riahi (2011:50) adalah sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut”.

**2.1.2 Laporan Keuangan**

**2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

 MenurutIrham Fahmi (2014:2) pengertian dari laporan keuangan adalah :

“suatu system yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) mengemukakan pengertian laporan keuangan yaitu:

“Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas”.

Menurut Munawir (2010:5) pengertian dari laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah laporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhuitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

**2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:126) tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. “Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud :
2. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan,
3. Untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya,
4. Untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya,
5. Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
6. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud :
7. memberikan gambran tentang deviden yang diharapkan pemegang saham,
8. menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membiayai kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk perluasan perusahaan,
9. memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan,
10. menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
11. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
12. memberikan informasi yang diperlukan tentang perubahaan harta dan kewajiban
13. mengungkapkan informasi yang relevan yang dibutuhkan para pemakai laporan”.

**2.1.2.3 Karakteristik laporan Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2014:8) kondisi dan situasi yang tergambarkan pada laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan, dan selanjutnya informasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi. Menurut Irham Fahmi (2014:8) keempat karakteristik tersebut adalah :

 “1. Dapat dipahami

Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya.Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda.Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal dan mudah dipahami.Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan atau industry yang sulit dipahami oleh orang-orang awam.Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.

2. Relevan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan.Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan.Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialitas.

 3. Dapat dipercaya

 Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan andal dan adapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur.Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding.Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajuikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya.Laporan keuangan yang disajikan secara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan.Agar memiliki daya banding, laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik da basis-basis pengukuran dengan konsisten”.

**2.1.2.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2014:3) pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut akan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Menurut Irham Fahmi (2014:3) sebuah laporan keuangan pada umumnya terdiri dari :

“1. Neraca

Neraca meringkaskan proses keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menampilkan sumber daya ekonomis (asset), kewajiban ekonomis (hutang), dan modal saham.

 2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi meringkas hasil dari kegiatan perusahaan selama periode tertentu.Laporan ini sering dipandang sebagai laporan akuntansi yang paling penting dalam laporan tahunan.Kegiatan perusahaan dalam periode tetrtentu mencakup aktivitas rutin atau operasional.

 3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham dalam neraca.Laporan perubahaan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini, kemudian laporan ini juga menunjukkan perubahaan modal serta sebab-sebab berubahnya modal.

 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu periode tertentu.

 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu aas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya”.

**2.1.3 Beban Pajak Tangguhan**

**2.1.3.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan**

Menurut Mohammad Zain (2008:187) pajak tangguhan terjadi akibat:

“perbedaaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.”

Menurut PSAK 46 dalam Mohammad Zain (2008:70) mendefinisikan bahwa beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah:

“Jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode”.

Menurut Harnanto (2013:115), beban pajak tangguhan dapat diartikan :

“Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.

Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang menurut Purba (2009:14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok :

“1. Perbedaan Permanen atau Tetap

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakhibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen.

 2. Perbedaan Temporer atau Waktu

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya:

1. Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan

garis lurus.

1. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan Rata-rata.
2. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk Perusahaan Pertambangan, Leasing, Perbankan dan Asuransi.
3. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia”.

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut :

“a. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan *joint venture* tidak diakui apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu *reversal* beda temporer tersebut.

b. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal *goodwill* yang berasal dari penggabungan usaha.

c. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak”.

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.

**2.1.3.2 Penghitungan Dasar Pajak Tangguhan**

Pada dasarnya bahwa PSAK No. 46 adalah cukup kompleks, karena untuk PSAK No. 46 secara utuh diperlukan juga pemahaman yang cukup atas UU PPh Indonesia. PSAK No. 46 mengatur mengenai tata cara pencatatan dan pengakuan atas pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan, dan bukan mengatur mengenai berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, maka untuk menghitung berapa besar jumlah pajak yang harus dibayar adalah berdasarkan ketentuan dalam UU Perpajakan.

Menurut Purba, (2009:68) penghitungan dasar pajak tangguhan:

“Hutang PPh dihitung berdasarkan laba akuntansi kena pajak. Akan tetapi, perlu disadari bahwa jumlah PPh yang nyata-nyata harus dibayar sesungguhnya adalah PPh terutang yang dihitung berdasarkan laba kena pajak, artinya biaya PPh bisa saja lebih kecil atau lebih besar dari hutang PPh. Untuk itu, diperlukan suatu penangguhan dari biaya PPh yang terlalu cepat diantisipasi atau biaya PPh yang ditunda pembayarannya. Karenanya, hutang PPh atau PPh yang harus dibayar/disetor pada negara, di hitung sebagai berikut:

Laba akuntansi sebelum pajak xxxx

Beda waktu

Biaya penyusutan = (xxx)

Beban imbalan pasca kerja = xxx

Jumlah beda waktu xxxx

Beda tetap

Pendapatan bunga = (xxx)

Beban jamuan = xxx

Jumlah beda tetap xxxx

Laba kena pajak xxxx

Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan xxxx

Laba kena pajak xxxx

Apabila penyusutan fiskal lebih kecil daripada penyusutan komersial akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan, sedangkan penyusutan fiskal lebih besar daripada penyusutan laba komersial akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Besarnya pajak tangguhan dihitung dari besarnya penyusutan beda waktu dikalikan tarif pajak tangguhan. Berdasarkan Undang-Undang N0.36 tahun 2008, tarif pajak tangguhan adalah 25%.”

Purba (2009:44) menjelaskan lebih lanjut mengenai ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat kewajiban dan aktiva pajak tangguhan :

(Dr) Beban pajak tangguhan xxx

(Cr) Kewajiban pajak tangguhan xxx

(Dr) Aktiva pajak tangguhan xxx

(Cr) Manfaat pajak tangguhan xxx

Berdasarkan pada penghitungan pajak penghasilan di atas, maka secara khusus penyajian dari perkiraan aktiva atau kewajiban PPh ditangguhkan berdasarkan PSAK No 46. Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar, maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

**2.1.3.3 *Deferral Method* ( Metode Pajak Tangguhan )**

Menurut Kieso dan Weygant, (2010:76) *Deferred method* (Metode Penangguhan):

*“*Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (income statement approach) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan matching principle pada periode terjadinya perbedaan tersebut. Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga muncul transaksi-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas misalnya keuntungan atau kerugian dari surat berharga yang siap untuk dijual kapan saja. Apabila menggunakan pendekatan laba rugi transaksi seperti itu tidak dapat terdeteksi, sehingga pendekatan ini dipandang kurang relevan.”

**2.1.4 Manajemen Pajak**

**2.1.4.1 Pengertian Manajemen Pajak**

Menurut Bernad (2011:122) manajemen pajak yaitu sebagai berikut:

“Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudnyatakan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest,* yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.”

**2.1.4.2 Tujuan Manajemen Pajak**

Menurut Minnick dan Noga (2010:79) tujuan manajemen pajak yaitu:

“untuk mewujud nyatakan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat informasi”.

 Suandy (201:6), tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

“1. Perencanaan Pajak (*tax planning*)

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*tax implementation*)

3. Pengendalian Pajak (*tax control*)

**2.1.5 Ukuran Perusahaan**

**2.1.5.1 Pengertian Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Dilihat dari sisi kemampuan memperoleh dana untuk ekspanasi bisnis, perusahaan besar mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan untuk investasinya dalam rangka meningkatkan labanya (Setiawan, 2009:165).

Menurut Jogiyanto (2011:282) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah sebagai alogaritma dari total asset diprediksi mempunyai hubungan negatif dengan rasio, kemudian perusahaan yang besar cenderung berinvestasi ke proyek yang mempunyai varian rendah, untuk menghindari laba yang ditahan”.

Definisi ukuran perusahaan menurut Torang (2012:93) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Ukuran Perusahaan adalah dapat menentukan besarnya jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”.

Menurut Kartika (2009:9) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total asset/ total aktiva yang dimiliki oleh setiap perusahaan dan digunakan sebagai tolak ukur skala perusahaan”.

Dari beberapa pengertian tentang ukuran perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya perusahaan yang berperan sebagai suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.

**2.1.5.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berbeda sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”

**2.1.5.3 Perhitungan Ukuran Perusahaan**

Menurut Budiasih (2008:24), ukuran perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:

Ukuran perusahaan dhitung dengan *Logaritma natural* dari total aktiva yang dirumuskan sebagai berikut

Ukuran perusahaan *= Ln Total Assets*

Rumus :

Keterangan : *Ln* : *Logaritma natural*

Lim : Limit

 n : Rata-rata total aktiva

Menurut Ikayanti (2005), Ukuran perusahaan dihitung dinyatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan diukur dengan natural (*Ln*) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Pengguna total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva yang mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”.

Selanjutnya menurut Ronald Clapham (1996) dalam Christina Debbynannie (2007) dan Desy (2011), ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah:

1. “Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan pada suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, misalnya satu tahun.
3. Total hutang ditambah dengan nilai pasar saham biasa perusahaan yang merupakan jumlah utang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada suatu atau suatu tanggal tertentu”.

Menteri perindustrian dengan SK No. 13/M/SK-1/1990 tanggal 14 Maret 1990 mengelompokkan perusahaan dengan didasarkan pada nilai asset yang dimiliki perusahaan seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Kriteria bidang usaha dalam kelompok industri kecil adalah: (a) nilai kekayaan perusahaan seluruhnya tidak lebih dari 600 juta Rupiah, tidak termasuk nilai rumah dan tanah yang ditepatinya, (b) pemilik adalah Warga Negara Indonesia”.

Sedangkan ukuran perusahaan yang didasarkan pada total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang diatur dalam ketentuan Bapepam No. 11/PM/1997, menyatakan bahwa:

“Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan modal (total asset) tidak lebih dari 100 Milyar Rupiah”.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki asset lebih dari 100 milyar Rupiah ke atas dikelompokkan ke dalam industry menengah dan besar.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa semakin besar nilai total asset, semakin besar pula ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan dapat dikatakan baik, karena perusahaan berusaha keras untuk tetap meningkatkan nilai asetnya

**2.1.6 Manajemen Laba**

**2.1.6.1 Pengertian Manajemen Laba**

Laba yang dihasilkan perusahaan merupakan salah satu ukuran kinerja yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi tentang laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement Of Financial Accounting Concept (SFAC) nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan berperan penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Hal inilah yang membuat pihak manajemen berusaha untuk melakukan tindakan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak eksternal.

Definisi manajemen laba menurut *National Association of Fraud Examiners* dalam Sri Sulistyanto (2008:49) adalah sebagai berikut :

“Manajemen Laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya”.

Menurut Sulistyanto (2008:6), Manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan “.

Menurut Charles W. Mulford dan Eugene E. Comiskey yang dialih bahasakan oleh Aurolla Saparini Harahap (2010:81) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Manajemen Laba adalah upaya untuk memanipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya“.

Ilham Fahmi (2013:279) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut :

“*Earnings managemen* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Belkoui dalam Achmad Daengs (2014:201) menyatakan :

“*Earnings management* adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia da mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Hal ini adalah salah satu contoh yang mencolok dari akuntansi yang dirancang”.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dilakukan secara sengaja, dalam batasan untuk mengarah pada suatu tingkat laba yang diinginkan. Tindakan ini merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

**2.1.6.2 Motivasi Manajemen Laba**

 Menurut Subramanyam, KR & Wild, Jhon J yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti (2010:132) mencatat ada tiga alasan yang dapat memicu manajer melakukan manajemen laba. Ketiga motivasi tersebut adalah sebagai berikut :

 “1. Insentif perpajakan

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi.Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba.Perjanjian bonus memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer tidak mendapat bonus lebih tinggi dari batas atas.Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah ini.Jika laba yang belum diubah berada diantara batas atas dan bawah, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba. Saat laba lebih tinggi dari batas atas atau lebih rendah dari batas bawah, manajer memiliki insentif untuk menurunkan laba dan membuat cadangan untuk bonus masa depan.

 2. Dampak harga saham

Manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaa. Manajer juga dapat melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan resiko dan menurunkan biaya modal.

 3. Insentif lain

Terdapat beberapa alasan manajemen laba lainnya.Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah misalnya untuk ketaatan undang-undang antimonopoli.Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari peerintah misalnya subsidi atau proteksi dari persaingan asing”.

**2.1.6.3 Pola dan Teknik Manajemen Laba**

 Menurut Subramanyam, KR & Wild, Jhon J yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti (2010:131) terdapat tiga teknik manajemen laba adalah sebagai berikut :

 1. “Meningkatkan laba

 Salah satu teknik manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik.Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode.

 2. *Big bath*

Teknik *big bath* dilakukan melalui penghapusan (*write-of*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (seringkali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Teknik *big bath* juga seringkali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya.

 3. Perataan laba

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba.Manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya.Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengn menciptakan cadangan laba dan kemudian melaporkan laba ini pada saat periode buruk.Banyak perusahaan menggunkan bentuk manajemen laba seperti ini”.

**2.1.6.4 Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba**

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management*. Menurut Ilham Fahmi (2013:279) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (manajemen laba) yaitu:

1. “Standar akuntansi keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manjemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan”.

 Faktor lain timbulnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetris informasi yang pada awalnya didasarkan karena *conflict of interest* antara *agent* dan *parsial*. *Agent* adalah manajemen perusahaan (internal) dan *parsial* adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak parsial disini adalah tidak hanya komisaris perusahaan tetapi juga termasuk kreditur, pemerintah dan lainnya.

**2.1.6.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba**

 Manajemen laba dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara principal (pemilik perusahaan) dengan agen (pengelola perusahaan).Hal ini terjadi karena pengelola (manajer) mempunyai informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dan dipergunakannya untuk meningkatkan utilitasnya. Terdapat faktor yang mempengaruhi manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

 Menurut Putu Putri Suriyani, dkk (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu:

 “1.Kepemilikan institusional.

 2. Dewan komisaris.

 3. Persentase saham public.

 4. Komite audit.

 5. *Leverage”.*

**2.1.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan pengaruhnya terhadap manajemen laba dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Tabel Penelitian Sebelumnya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Peneliti** | **Judul** | **Perbedaan** | **Persamaan** |
| 1. | Gagaring Pagalung (2011) |

|  |  |
| --- | --- |
| Pengaruh *Corporate Governance,* Ukuran Perusahaan dan *Laverage* terhadap Manajemen Laba. |  |

 | Variabel yang ditelitinya hanya ukuran perusahaan. Periode perusahaan yang digunakan berbeda. | Sama-sama menguji variable ukuran perusahaan agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba. |
| 2. | Halimah Shatila Palestin (2007) | Analisis Pengaruh ukuran perusahaan dan mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba, | Variabel yang ditelitinya hanya ukuran perusahaan. Periode perusahaan yang digunakan berbeda. | Sama-sama menguji variable ukuran perusahaan agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba. |
| 3. | Santhi Yuliana Sosiawan (2012) | Pengaruh kompensasi, *laverage,* ukuran perusahaan dan *earning power* terhadap manajemen laba. | Variabel yang ditelitinya hanya ukuran perusahaan. Periode perusahaan yang digunakan berbeda. | Sama-sama menguji variable ukuran perusahaan agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba. |
| 4. | Yulianti (2005)  | Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba  | Variabel yang ditelitinya hanya beban pajak tangguhan saja. Sedangkan dalam penelitian saya, saya tidak hanya meneliti beban pajak tangguhan. Periode perusahaan yang digunakan berbeda. | Sama-sama menguji variable beban pajak tangguhan agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba. |
| 5 | Dewa Ketut Wira Santana dan Made Gede Wirakusuma (2016) | Pengaruh perencanaan pajak, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. | Variabel yang ditelitinya hanya manajemen laba. Periode perusahaan yang digunakan berbeda. | Sama-sama menguji manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek indonesia. |
| 6 | Ikhsan Fikri Aulia, Dwi Fitri Puspa, dan Herawati (2009) | Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang terhadap Manajemen Laba | Variabel yang diteliti yaitu beban pajak tangguhan, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang. sedangkan dalam penelitian saya hanya meneliti beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan. periode perusahaan yang digunakan berbeda | Sama-sama menguji variabel beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba. |
| 7. | Yana Ulfah (2012)  | Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba  | Variabel yang ditelitinya hanya beban pajak tangguhan saja. Sedangkan dalam penelitian saya, saya tidak hanya meneliti beban pajak tangguhan. Periode perusahaan yang digunakan berbeda. | Sama-sama menguji variable beban pajak tangguhan agar terlihat ada tidaknya pengaruh terhadap manajemen laba. |

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu manajemen laba untuk menghindari pelaporan penurunan laba dan manajemen laba untuk menghindari pajak yang harus dibayar dalam jumlah yang tinggi serta menghindari dari pelaporan kerugian yang dapat menurunkan minat investor. Dalam hal ini, terdapat suatu indikasi manajemen melakukan manajemen laba yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. **Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba**

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat dari perbedaan temporer antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di periode mendatang akan di akui sebagai beban pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui beban pajak tangguhan. Hal ini berarti bahwa kenaikan beban pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang akan menaikkan nilai laba suatu perusahaan. Beban pajak tangguhan muncul dari komponen-komponen yang bersifat akrual dimana manajer dapat menentukan besarnya nilai perusahaan dari nilai komponen tersebut. Pihak manajemen dalam mengatur komponen-komponen penyebab terjadinya perbedaan temporer yang merupakan pembentuk beban pajak tangguhan dalam manajemen laba sehingga menghasilkan laba yang diharapkan. Penelitian Yulianti (2004) dan Philips, et al (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan mengatur komponen pembentuk pajak tangguhan sehingga beban pajak tangguhan memiliki hubungan nilai yang lebih besar dengan manajemen laba.

Manajemen laba merupakan peluang bagi manajemen untuk merekayasa besarnya beban pajak tangguhan guna menaikkan dan menurunkan tingkat labanya. Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang dan mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan. Berdasarkan penelitian Philips. et al (2003) membuktikan adanya praktik manajemen laba dengan menggunakan beban pajak tangguhan. Penelitian yang dilakukan Yulianti (2005) juga menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan positif signifikan dengan probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian perusahaan.

**2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba**

 Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Dilihat dari sisi kemampuan memperoleh dana untuk ekspanasi bisnis, perusahaan besar mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan untuk investasinya dalam rangka meningkatkan labanya (Setiawan, 2009:165).

Menurut Jogiyanto (2011:282) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah sebagai alogaritma dari total asset diprediksi mempunyai hubungan negatif dengan rasio, kemudian perusahaan yang besar cenderung berinvestasi ke proyek yang mempunyai varian rendah, untuk menghindari laba yang ditahan”.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor pendorong praktek manajemen laba. Menurut Budhijono (2006) semakin besar perusahaan makan akan mendapat perhatian dari banyak pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Perusahaan akan mempermainkan jumlah laba untuk menarik investor agar menanamkan saham pada perusahaan. Juniarti dan Corolina (2005) menyatakan perusahaan yang berukuran besar cenderung untuk menghindari laba yang berfluktuatif drastis. Laba yang meningkat drastis akan berdampak pada pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, sedangkan laba yang menurun drastis akan memberikan pandangan yang kurang baik. Semakin besar perusahaan makan biaya politik perusahaan juga besar, biaya politik muncul dikarenakan probabilitas perusahaan yang tinggi akan dapat menarik perhatian pihak eksternal perusahaan.

Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Welvin dan Herawaty (2010) mengemukakan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar.

Herni dan Susanto (2008) serta Handayani dan Rachadi (2009) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dilihat dari jumlah total aktiva perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan tentu memiliki total aktiva yang relatif besar, sehingga dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi serta semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh laba dari operasinya. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Dari kerangka pemikiran di atas maka dapat digambarkan alur hubungan antara variabel yang diteliti dalam paradigma sebagai berikut :

Beban Pajak Tangguhan

(*X*1)

(Harnanto, 2013:115)

Manajemen Laba (*Y*)

(Sri Sulistyanto, 2008:49)

Beban Pajak Tangguhan (*X*1)

(Harnanto, 2013:115)

Perencanaan Pajak

(*X*2)

Ukuran Perusahaan (*X*2) (Jogiyanto, 2011:282)

**Gambar 2.1 Paradigma Penelitian**

**2.3 Hipotesis Penelitian**

 Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum ada jawaban empirik.

 Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka peneliti mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H1 : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.